

**KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM MENYATAKAN KASASI PENUNTUT UMUM
TIDAK DAPAT DITERIMA
(STUDI KASUS NOMOR: 1472 K/PID/2003)**



**Penulisan Hukum
(SKRIPSI)**

**Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
GILANG PURNA RAMADHAN
E 1106128**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2011

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG

DALAM MENYATAKAN KASASI PENUNTUT UMUM

TIDAK DAPAT DITERIMA

(STUDI KASUS NOMOR: 1472 K/PID/2003)



Oleh

Gilang Purna Ramadhan

E1106128

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Maret 2011

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Kristiyadi, S.H., M.Hum.
NIP. 1958 1225 198601 1001

Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
NIP. 1982 1008 200501 1001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM MENYATAKAN KASASI PENUNTUT UMUM
TIDAK DAPAT DITERIMA
(STUDI KASUS NOMOR: 1472 K/PID/2003)



1. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.**
NIP. 195706291985031002
(Ketua)

()

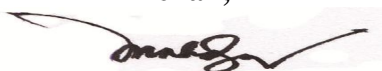
2. **Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.**
NIP. 198210082005011001
(Sekretaris)

()

3. **Kristiyadi, S.H., M.Hum.**
NIP. 195812251986011001
(Anggota)

()

MENGETAHUI
Dekan,



Mohammad Jamin, S.H, M.Hum
NIP. 1961 0930 198601 1 001

PERNYATAAN

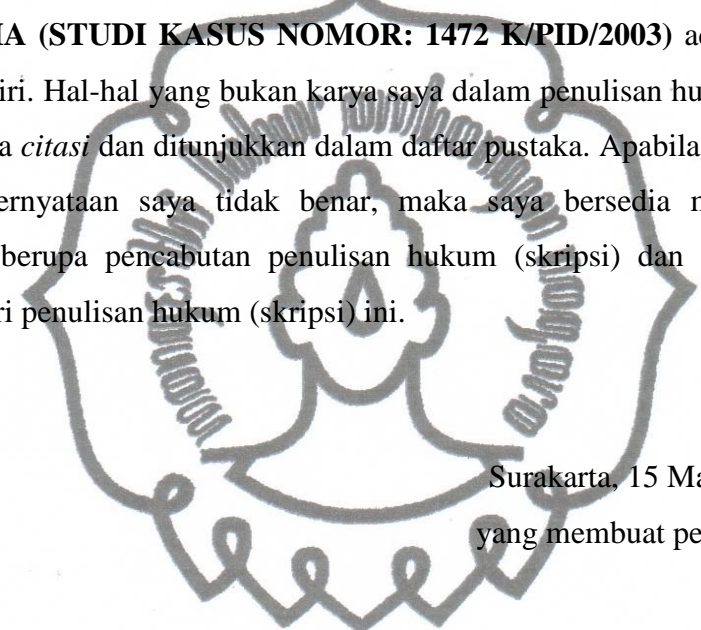
Nama : Gilang Purna Ramadhan

NIM : E1106128

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

**KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENYATAKAN KASASI PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT
DITERIMA (STUDI KASUS NOMOR: 1472 K/PID/2003)** adalah betul-betul

karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta, 15 Maret 2011
yang membuat pernyataan

Gilang Purna Ramadhan

NIM. E1106128

ABSTRAK

GILANG PURNA RAMADHAN, E 1106128, KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENYATAKAN KASASI PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS NOMOR: 1472 K/PID/2003), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian Hukum ini bertujuan Untuk mengetahui kajian pertimbangan hakim mahkamah agung dalam menyatakan kasasi penuntut umum tidak dapat diterima (studi kasus nomor: 1472 k/pid/2003).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode penelitian sebagai berikut : Jenis penelitian normatif, metode penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus, sifat penelitian preskriptif dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum adalah sumber bahan hukum sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Mahkamah Agung Nomor 1472 K/Pid/2003), bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian pertimbangan hakim mahkamah agung dalam menyatakan kasasi penuntut umum tidak dapat diterima. Pertimbangan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 1472 K/Pid/2003 berdasar Pasal 244, Pasal 248 ayat (4) serta Pasal 191(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam perkara tersebut menolak permohonan kasasi Penuntut Umum karena tidak dapat mengajukan alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, Kasasi, Penuntut Umum, tidak dapat diterima.

ABSTRACT

GILANG PURNA RAMADHAN, E 1106128, SUPREME COURT JUSTICE STUDY OF CONSIDERATION IN PUBLIC GENERAL PROSECUTOR AN APPEAL CAN NOT BE ACCEPTED (CASE STUDY NUMBER: 1472 K/PID/2003), Faculty of Law Sebelas Maret University.

Legal research is aimed to know the judge's consideration of the Supreme court review in an appeal the prosecution can not be accepted (case study number: 1472 k/pid/2003).

The research method used in the study of this law is to use the following research methods : Type of normative research, qualitative research methods, case study approach, the nature of prescriptive research and analysis of legal materials used are of secondary legal materials, sources of legal materials is a source of secondary legal materials that are still relevant to the issues of primary legal materials (Law No. 8 of 1981 about Criminal Law, Law No. 48 of 2009 about Judicial Power, Supreme Court No. 1472 K/Pid/2003), secondary legal materials (text books written by legal experts, law journals, opinions of scholars, scientific works, papers, and magazines), and tertiary legal materials (dictionaries and the internet).

This study aims to determine the study consideration the supreme court judges in an appeal the prosecution can not be accepted. Consideration was carried out by the Supreme Court in its decision No: 1472 K/Pid/2003 under Article 244, Article 248 paragraph (4) and Article 191 (2) of the draft Criminal Procedure Code (Procedure Code) Based on the analysis of data that has been done, it can be concluded that the Supreme Court in the case of Public Prosecutor rejected the appeal.

Keywords: Considerations Justice Supreme Court, the Cassation, the Public Prosecutor, is unacceptable.

commit to user

MOTTO

” Hidup selalu diwarnai dengan gejolak, ada kalanya kita tak selalu menang melawan ketidak adilan, namun biarkanlah hati kita berbicara tentang impian dan harapan, bahwa ternyata kebahagiaan selalu ada walau kecil kemungkinan ia akan tiba dengan kita sendiri berusaha meraihnya ”

(Fhisa Citra)

“Kalau terpaksa gunung akan bergeser, bergeserlah.....

Kalau laut akan meluap, meluaplah.....

Kalau sinar rembulan akan pudar sudah, pudarlah.....

Tetapi janganlah wibawa hukum, keadilan dan kebenaran mulai pudar, sebab kalau sampai pudar, terancam lah peradaban kita.”

(Ismail Saleh, dalam Leden Marpaung: 1995: 29).

Kepintaran seseorang tidak dilihat dari indek prestasinya atau nilai yang dicapainya dalam belajar, kepintaran seseorang itu merupakan bagaimana seseorang itu dapat menciptakan suatu hal, ide, karya yang baru yang dapat diterima oleh masyarakat..

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:



1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Edy Purnomo dan Ibu Woro Suryati
3. Nenekku Sulasmi Hartoyatmanto
4. Adikku Adhe Noora Salsabila dan Dhean Najhan
5. Teman-teman dan Sahabat-sahabatku

commit to user

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur dan sembah sujud penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, serta shalawat serta salam kepada Nabi junjungan Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENYATAKAN KASASI PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS NOMOR : 1472 K/PID2003)” dengan baik.

Penyusunan penulisan hukum ini mempunyai tujuan yang utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Djuwitastuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan bagi tersusunnya penulisan hukum ini dan bimbingan-bimbingan yang berkenaan dengan perkuliahan.
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku ketua bagian hukum Acara. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menguji ujian skripsi penulis.
5. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing 1 penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.

commit to user

6. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku pembimbing 2 penulisan hukum yang telah memberikan masukan-masukan dan pengarahan yang sangat berharga sehingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
7. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan ujian remidi khusus Bahasa Inggris sehingga penulis dapat melengkapi syarat-syarat untuk ujian pendadaran.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini.
9. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
10. Bapak Edy Purnomo, SE dan Ibu Woro Suryati, selaku kedua orangtua penulis yang selalu memberikan cinta dan kasih, dorongan, bantuan serta doa yang tiada henti kepada penulis.
11. Hj. Sulasmi selaku nenek penulis dan Almarhum H. Hartoyatmanto yang belum lama berpulang ke hadapan sang pencipta, terimakasih atas doa, dorongan serta nasehat-nasehat yang akan selalu penulis kenang seumur hidup penulis.
12. Adhe Noora Salsa Bela dan Dhean Najhan selaku adik penulis, belajar yang rajin dan jangan nakal.
13. Sahabat, teman perjuangan di Fakultas Hukum yang selalu bersama, tertawa, bercanda, dalam suka duka Nasrul, Yusup, Alvin, Yoga, Aditya G, Tyas, Arif W, Prima, Akbar M, Yanuar, Pras, Agus Klaten, Ketib, Mas Eko dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas persahabatan dan persaudaraan yang terlahir dari satu tujuan untuk menyambut kehidupan dan masa depan yang cerah, semoga jalinan persahabatan kita abadi selamanya... Amien.
14. Teman-teman wisma Mbah Wiro, Kipli, Arek, Rengga, Gothul, Candut, Wantek, Anggi, Nyomat, Totok, Melon, Kang dodik, Bulin, Jenggo, Kenthus, terima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama ini.

15. Teman-Teman PB dan TFC, Nasrul, Arif Ketib, Budi, Hafiz, Alvin, Rudi, Ari, Paul. Oghan, Mas fariz, Endy endot, Wawan, Mahmut, Sugenk, Kapil, Uuk, Londho, Nunuk, Kharis, Tatang,Bimo,Yudha,Seno,Heri,Wiyanto serta teman-teman lain yang tidak bisa disebut satu per satu terima kasih dukungan dan kebersamaannya.
16. Teman-teman klub Sepakbola BTB Babarsari yogyakarta dan KKK Klaten, Ketib,Iwan cina, Mas fendi, Mas sinyo, Bobby, Arif E.T, Catur, Cukrik, Yudi, Irvan, Mbonil, Seno, Muklis, Kang Tri dan teman-teman lain serta pelatih dan manajer Mas Wahyu dan Pak Rokhis terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan di tim, semoga tahun ini bisa promosi ke Divisi 1.
17. Teman-temanku angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala pengalaman dan motivasinya.
18. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Namun demikian, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun merupakan hal yang sangat penulis harapkan.

Surakarta, 9 April 2011

Penulis

Gilang Purna Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	11
a. Pengertian Pertimbangan Hakim	11
b. Dasar Pertimbangan Hakim	12
2. Tinjauan tentang Hakim	14
a. Pengertian Hakim	14
b. Tugas dan Wewenang Hakim	15
3. Tinjauan tentang Mahkamah Agung.....	17

	a. Pengertian Mahkamah Agung	17
	b. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Agung.....	
	17
	4. Tinjauan tentang Penuntut Umum	21
	a. Pengertian Penuntut Umum.....	21
	b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....	22
	5. Tinjauan Tentang Kasasi.....	22
	B. Kerangka Pemikiran	27
Bab III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A. Hasil Penelitian	30
	1. Kasus Posisi	30
	2. Identitas Terdakwa.....	31
	3. Surat Dakwaan	31
	4. Tuntutan Penuntut Umum.....	38
	5. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi	40
	6. Putusan Mahkamah Agung	40
	B. Pembahasan	43
	1. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menolak Kasasi Penuntut Umum Dalam Kasus Nomor : 1472 K / PID / 2003.....	43
Bab IV	PENUTUP.....	49
	A. Simpulan	49
	B. Saran.....	50
	DAFTAR PUSTAKA	51
	LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Alur Kerangka Pemikiran	27
---	----



commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1472
K/Pid./2003.



commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi, tercantum dalam rumusan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan rumusan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa: “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tersebut, di bidang substansi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya

masih selalu menjadi wacana kalangan teoritis maupun praktisi oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mengenyampingkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir yang menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari adanya putusan bebas, pihak yang merasa dirugikan terutama pihak korban suatu tindak pidana amat mudah membangun opini yang menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Kondisi dan situasi seperti ini mudah dan rawan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan, khususnya hakim, yang berujung adanya luapan emosi dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan bebas tersebut.

Dengan adanya gejala dan fakta sosio yuridis seperti tersebut berimplikasi timbulnya kesan bahwa putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu untuk dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana, dalam konteks ini terutama demi tegaknya wibawa esensi putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum (law enforcement), (www.lawskripsi.com/index.php?option=com...id...).

Mengenai pengertian upaya hukum, secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Penuntut Umum, yakni apabila pihak-pihak tersebut merasa tidak puas akan kualitas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Salah satu bentuk upaya hukum adalah kasasi Berdasarkan esensi Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pendapat kalangan doktrina dapat disimpulkan bahwa upaya hukum kasasi merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau dikesampingkan oleh terdakwa atau penuntut umum. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat bawahnya maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan dan pengetrapan hukum yang telah dijalankan oleh pengadilan di bawahnya kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan.

Pada perkara tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan terdakwa SRIYATUN alias SRI MEDOK binti MUH. DALIM, Penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi yang menjatuhkan putusan berupa melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan Majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana. Penuntut umum menilai bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Purwodadi menjatuhkan putusan tidak sebagaimana mestinya karena dalam dakwaan penuntut umum terdakwa jelas telah terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 379 (a) jo. Pasal 65, Pasal 378 Jo. Pasal 65, 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan penilaian tersebut Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dengan menyusun tuntutan yang berupa bahwa terdakwa benar telah terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dan menghukum terdakwa. Akan tetapi dalam Putusannya Nomor : 1472 K/Pid/2003 Mahkamah Agung mempertimbangkan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebelum menjatuhkan putusannya. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi merupakan

putusan bebas murni karena putusan tersebut pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata sehingga berdasar Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan Mahkamah Agung juga mempertimbangkan mengenai permohonan kasasi yang diajukan telah melewati tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga permohonan kasasi dianggap gugur. Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 1472 K/Pid/2003 menyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENYATAKAN KASASI PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS NOMOR : 1472 K/PID/2003)"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibuat oleh penulis bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat sesuai dengan sasaran dan tujuan dari permasalahan yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menolak Kasasi Penuntut Umum Dalam Kasus Nomor : 1472 K/PID/2003 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menolak Kasasi Penuntut Umum Dalam Kasus Nomor : 1472 K/PID/2003 Bertentangan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum khususnya dalam hukum acara pidana dengan harapan bermanfaat di kemudian hari serta untuk meningkatkan kemampuan berfikir secara normatif penulis sebagai landasan argumen yang kuat bagi praktisi hukum.
- b. Untuk memperoleh sumber hukum yang lengkap sebagai bahan dalam menyusun suatu penelitian hukum agar dapat memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya dan untuk memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menolak Kasasi Penuntut Umum Dalam Kasus Nomor : 1472 K/PID/2003 Bertentangan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah.
- b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Jenis penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2006:33).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum tersebut. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-

norma hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93).

Dari kelima pendekatan penelitian hukum tersebut, penulis di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu kajian terhadap kasus nomor 1472 K/Pid./2003 dalam perspektif pertimbangan hakim.

4. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Namun, dalam bukunya Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1472 K/Pid/2003.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141).

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti di dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengklasifikasi, menguraikan bahan hukum yang diperoleh kemudian melalui proses pengolahan nantinya bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Metode deduksi digunakan penulis untuk menganalisa bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47). Dalam penelitian ini metode deduksi yang dilakukan adalah diawali penelitian dengan premis mayor yang bersifat umum yang selanjutnya dikerucutkan terhadap premis minor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas empat bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran.

Kerangka teori meliputi **Tinjauan Tentang pertimbangan Hakim :**

commit to user

Pengertian pertimbangan Hakim dan dasar pertimbangan Hakim, **Tinjauan tentang Hakim** : Pengertian Hakim dan Tugas & wewenang Hakim, **Tinjauan tentang Mahkamah Agung** : Pengertian Mahkamah Agung dan kekuasaan & kewenangan Mahkamah Agung, **Tinjauan Tentang Penuntut Umum** : Pengertian Penuntut Umum dan Tugas & wewenang Penuntut Umum, **Tinjauan Tentang Kasasi** : Pengertian Kasasi dan Tata cara pengajuan Kasasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini penulis menyajikan tentang **Hasil Penelitian** : Kasus Posisi, Identitas Terdakwa, Surat Dakwaan, Tuntutan Penuntut Umum, Putusan Negeri Purwodadi, Putusan Mahkamah Agung, **Pembahasan** : Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menolak Kasasi Penuntut Umum Pada Kasus Nomor : 1472 K/Pid/2003.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV penulis kemukakan simpulan dan saran yang berdasarkan pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Majelis hakim sebagai organ pengadilan mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, memutus atau mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim dalam menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya, sebelum menjatuhkan putusan, maka majelis hakim tersebut mengadakan suatu musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia. Hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu "Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah akhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang". Dan pada ketentuan Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut "Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya".

Menurut Rusli Muhammad dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua kategori, yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - b) Keterangan terdakwa;
 - c) Keterangan saksi;
 - d) Barang bukti;
 - e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.
- 2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:

- a) Latar belakang terdakwa;
- b) Akibat perbuatan terdakwa;
- c) Kondisi diri terdakwa;
- d) Agama terdakwa (Rusli Muhammad, 2006:124-144).

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis hakim sebagai organ pengadilan mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, memutus atau mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim dalam menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya, sebelum menjatuhkan putusan, maka majelis hakim tersebut mengadakan suatu musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia. Hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu "Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah akhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang". Dan pada ketentuan Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut "Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya".

Menurut Rusli Muhammad dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua kategori, yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang bukti;
- e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:

- a) Latar belakang terdakwa;
- b) Akibat perbuatan terdakwa;
- c) Kondisi diri terdakwa;
- d) Agama terdakwa

(Rusli Muhammad, 2006:124-144).

Selain dari dasar pertimbangan diatas juga dikenal adanya sumber hukum, Pada umumnya sumber hukum dibagi dua yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material terkait dengan aspek-aspek diluar hukum, misalnya aspek filsafat, aspek historis, aspek sosiologis dan berbagai aspek lainnya. Sumber hukum formal yaitu sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, terdiri dari undang-undang, kebiasaan dan adat, perjanjian/ traktat, yurisprudensi dan doktrin. Tiga sumber hukum yang pertama disebutkan merupakan sumber hukum yang utama sedangkan dua sumber hukum yang terakhir disebutkan merupakan sumber hukum tambahan.

Disebutkan sebagai sumber hukum tambahan karena tidak mengikat secara hukum kepada hakim.

Hakim pada umumnya dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila tidak menemukan ketentuan yang mengatur permasalahan tersebut dalam undang-undang tertulis dapat diperkenankan menggunakan ketentuan hukum adat dan kebiasaan, yurisprudensi maupun doktrin para sarjana hukum terkemuka, dalam melaksanakan penemuan hukum itu, hakim sudah diberi payung hukum dengan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 sehingga hakim dapat memeriksa dan memutus suatu kasus yang diharapkan dapat memberi rasa keadilan dan demi tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Yurisprudensi dapat menjadi yurisprudensi tetap apabila suatu kaidah atau ketentuan dalam suatu putusan kemudian diikuti secara tetap oleh para hakim dalam putusannya dan dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum umum. Oleh karena itu, yurisprudensi dalam sistem hukum pidana membawa pengaruh cukup besar dalam perkembangan hukum pidana baik hukum materilnya maupun hukum formilnya (<http://hukumonline.com/yurisprudensi..index-php..>).

2. Tinjauan Tentang Hakim

a. Pengertian Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

b. Tugas dan Wewenang Hakim

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dalam suatu negara hukum seperti halnya Indonesia, maka hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Di samping sebagai Pegawai Negeri, hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menangani suatu perkara pidana, Hakim mempunyai wewenang antara lain :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya

atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukum-nya (Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
8. Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ter Haar mengatakan hakim Indonesia harus mendekatkan diri serapat-rapatnya dengan masyarakat. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka diharapkan peranan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat dan dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul. Yurisprudensi lama yang didasarkan pada HIR, tentu banyak yang telah tidak sesuai dengan peraturan acara yang baru (A. Hamzah, 1996 : 103).

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Tanggung jawab moral
adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan.

commit to user

2. Tanggung jawab hukum
adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum.
3. Tanggung jawab teknis profesi
adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

3. Tinjauan Tentang Mahkamah Agung

a. Pengertian Mahkamah Agung

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan

b. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Agung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung diberi kekuasaan dan kewenangan yaitu: Pasal 28 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa:

- 1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a) Permohonan kasasi;
 - b) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1), Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembagian tugas dalam Mahkamah Agung.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.” Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

Fungsi Mahkamah Agung

- a) Fungsi Peradilan (Fungsi Yustisia)

Fungsi Yustisia adalah fungsi yang terpenting dari Mahkamah Agung, dikatakan terpenting karena fungsi yustisia tersebut sangat menentukan (mempengaruhi) jalannya penyelenggaraan peradilan. Fungsi Yustisia dimaksudkan adalah fungsi Mahkamah Agung dalam bidang peradilan. Mengenai

tugas peradilan, walaupun hanya menyangkut bagian dari fungsi tersebut, fungsi pemegang monopoli dari peradilan kasasi dalam posisinya sebagai puncak tunggal dari semua lingkungan peradilan tersebut, pemeriksaan perkara kasasi masih didampingi dengan fungsi untuk memutuskan sengketa yurisdiksi antara hakim dan pengadilan, kemudian memutus dalam tingkat banding terhadap putusan-putusan arbitrase.

b) Fungsi *Judicial Review*

Fungsi *Judicial Review* adalah fungsi Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil suatu produk perundang-undangan, Pelaksanaan hak menguji materiil itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Sehubungan dengan hal ini dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, digariskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;
- (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari pada undang-undang atas dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

c) Fungsi Pengawasan dan Pembinaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di bidang peradilan, Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan tertinggi dalam hal:

- (1) Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

commit to user

- (2) Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dari semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan tugasnya;
- (3) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bertalian dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan;
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

d) Fungsi Pertimbangan

Fungsi Mahkamah Agung untuk memberikan pertimbangan kepada lembaga tinggi negara, diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu “ Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.”

e) Fungsi Mengatur

Apabila dalam pelaksanaan atau dalam penyelenggaraan peradilan, terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang dan hal itu dipandang segera untuk diatur demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur hal dimaksud. Kewenangan Mahkamah Agung mengatur hal demikian itu, diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

4. Tinjauan Tentang Penuntut Umum

a. Pengertian Penuntut Umum

Pengertian Jaksa terdapat dalam Pasal 1 butir 6 a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian Penuntut umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 6 b adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan. Ketentuan ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 1 menyebutkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2) menyebutkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan menindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjadi kehormatan dan martabat profesinya. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang merupakan

kesatuan dan tidak terpisah-pisah dalam melakukan penuntutan. Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, tentunya dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa di beri suatu wewenang. Berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- 10) Melaksanakan penetapan Hakim.

Adalah merupakan tuntutan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

5. Tinjauan Tentang Kasasi

a. Pengertian Kasasi

Dalam Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 153 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang putusan pengadilan tingkat terakhir yang dapat dimintakan kasasi dan para pihak (terdakwa atau penuntut umum) yang dapat mengajukan permohonan kasasi. Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang kewajiban mengajukan alasan dan memasukan memori kasasi oleh pemohon kasasi.

Jika pengertian kata “Kasasi” dan pengertian “Upaya Hukum” tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/ kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Oemar Seno Aji menyatakan antara lain adalah sebagai berikut :

“Kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Ia (kasasi) bertujuan untuk menciptakan suatu kesatuan hukum disamping hendak menjamin kesamaan dalam peradilan”.

Terhadap arti kasasi ini, perlu diamati perumusan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu :

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
4. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Mahkamah Agung.
(Harun M. Husni, 1992: 47-49).

b. Tata Cara Pengajuan Kasasi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah ditetapkan tentang cara pengajuan kasasi sebagai berikut :

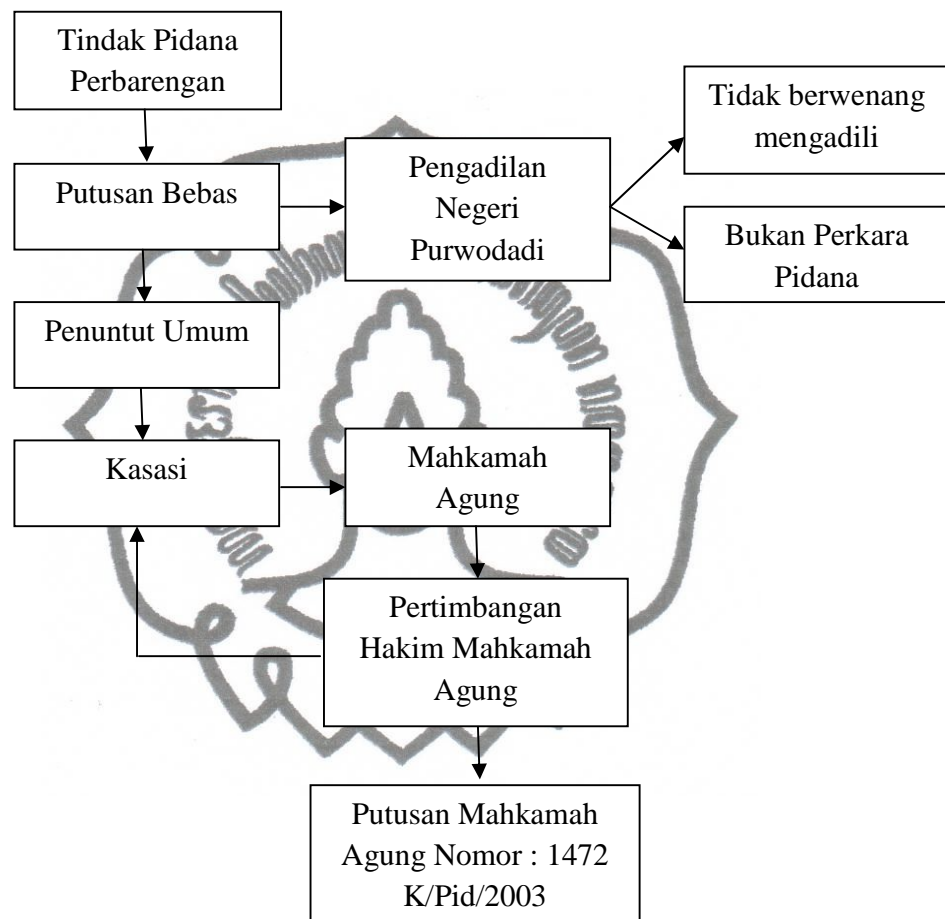
1. Cara mengajukan permohonan kasasi diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan bahwa permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kasasi kepada penitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
2. Permohonan kasasi tersebut oleh panitera dicatat dalam sebuah surat keterangan yang disebut akta permintaan kasasi yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi dan panitera dan dicatat dalam suatu daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
3. Dalam Pasal 245 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditegaskan bahwa dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa, maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka penitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
4. Dalam Pasal 247 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditegaskan pula bahwa permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali. Pengaturan lebih lanjut tentang hal ini, terdapat dalam

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal tersebut diatur tentang tidak hanya tentang berapa kali permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

(Harun M. Husni, 1992 : 66-67).



B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Alur kerangka Pemikiran

Keterangan :

Pada perkara tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan terdakwa SRIYATUN alias SRI MEDOK binti MUH. DALIM, Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan berupa putusan bebas kepada terdakwa, putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi atas dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan bahwa pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena perkara yang diajukan bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata. Atas Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi yang memutus bebas terdakwa SRIYATUN alias SRI MEDOK binti MUH. DALIM Penuntut Umum merasa Majelis Hakim Purwodadi tidak menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya yang padahal jelas tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu, dalam dakwaan primair diancam dengan pidana Pasal 379 (a) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dakwaan subsidair diancam dengan pidana Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lebih subsidair diancam dengan pidana Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atas ketidak puasan terhadap putusan pengadilan negeri tersebut Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung. Setelah menerima berkas perkara atau akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai beberapa hal terkait dengan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, diantaranya adalah pertimbangan yang didasarkan pada yurisprudensi yang menyebutkan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan berupa putusan bebas murni maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, dalam perkara tersebut perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata sehingga terdakwa diputus bebas murni, dan pertimbangan Mahkamah Agung mengenai jangka waktu pengajuan kasasi, pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah melewati tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) maka permohonan kasasi dianggap gugur. Setelah mempertimbangkan mengenai beberapa hal tentang pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Purwodadi maka Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 1472 K/ Pid/ 2003 ,menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi

Pada bulan Juni 2001 sekitar pukul 11.00 Wib dan pada hari yang tidak diingat pada tanggal 14 September 2001 sekitar pukul 11.00 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 di Desa Tunggak, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, terdakwa Sriyatun alias Sri medok binti Muh. Dalim telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu menjadikan kebiasaan atau mata pencaharian membeli barang berupa keranjang tembakau dan tembakau kering dengan maksud mendapat barang itu untuk dirinya atau untuk orang lain dengan tidak membayar lunas. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengadakan kesepakatan jual beli keranjang tembakau dengan saksi korban Kudhori bin Bari yang dilakukan pada bulan Juli 2001 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Puskesmas Toroh 2 di Ds. Tunggak, Kec.Toroh Kab.Grobogan, kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Juli 2001 saksi dr.Aisyah Lahji menelpon saksi korban Kudhori bin Bari untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Dalam perjanjian tersebut saksi korban Kudhori bin Bari akan mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun sampai sekarang saudara Sriyatun binti Muh.Dalim tidak pernah memberikan uang dan keuntungannya pada saksi korban Kudhori bin Bari.

2. Identitas Terdakwa

N a m a : **SRIYATUN alias SRI MEDOK binti MUH.**

DALIM;

Tempat lahir : Demak ;

Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 13 Juni 1964;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tamansari Rt.03.Rw.II, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

3. Surat Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim pada hari dan tanggal yang tidak ingat pada bulan Juni 2001 sekitar pukul 11.00 Wib dan pada hari yang tidak diingat pada tanggal 14 September 2001 sekitar pukul 11.00 atau setidaknya pada tahun 2000 di Desa Tunggak, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu menjadikan kebiasaan atau mata pencaharian membeli barang berupa keranjang tembakau dan tembakau kering dengan maksud mendapat barang itu untuk dirinya atau untuk orang lain dengan tidak membayar lunas perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Juli 2001 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Puskesmas Toroh 2 di Ds. Tunggak, Kec.Toroh

Kab.Grobagan, saksi korban Kudhori bin Bari dengan Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim, dimana kemudian terjadi kesepakatan jual beli keranjang tembakau antara saksi korban Kudhori bin Bari dengan Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim

- Selanjutnya masih dalam bulan Juli 2001, saksi korban Kudhori bin Bari menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari berikutnya masih dalam bulan Juli 2001 saksi dr.Aisyah Lahji menelpon saksi korban Kudhori bin Bari untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa saudara Sriyatun binti Muh.Dalim dan pembayarannya akan dilakukan pada akhir September awal Oktober 2001 serta saksi korban Kudhori bin Bari akan mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun sampai sekarang saudara Sriyatun binti Muh.Dalim tidak pernah memberikan uang dan keuntungannya pada saksi korban Kudhori bin Bari, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya pada hari yang tidak diingat, pada tanggal 14 September 2001 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim menyuruh Agus Saifudin bin Suparman dan Supariyanto bin Sukindar untuk membeli tembakau kering di Desa Tunggak, Kec.Toroh Kab.Grobagan, dimana sebelumnya saksi dr.Aisyah Lahji telah menyuruh saksi korban Kudhori bin Bari untuk membeli tembakau dari para petani yang nantinya akan dibeli oleh Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim, kemudian Agus Saifudin bin Suparman dan Supariyanto bin Sukindar melakukan penimbangan tembakau kering milik saksi korban dan juga milik Guntur dan Saksi Joko Susilo, dengan berat keseluruhannya sebanyak 8.438 Kg dengan harga Rp.88.161.000,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar oleh Terdakwa dua hari setelah tembakau tersebut dikirim,

kemudian pada tanggal 14 September 2001 tersebut dan tanggal 15 September 2001 saksi korban Kudhori bin Bari mengirim tembakau tersebut pada Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim, namun setelah tembakau tersebut dikirim, Terdakwa sampai saat ini tidak pernah melakukan pembayaran pada saksi korban, padahal saksi korban sudah berkali-kali menagih pada Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.88.161.000,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 379 (a) jo pasal 65 (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan diatas, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yaitu dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar tahun 2000 saksi korban Kudhori bin Bari saksi kenal dengan saksi dr.Aisyah Lahji bekerja di Puskesmas Toroh 2 di Ds. Tunggak, Kec.Toroh Kab.Grobagan, yang selanjutnya dr.Aisyah Lahji akan mengenalkan saksi korban Kudhori bin Bari pada Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim yang menurut keterangan dr.Aisyah Lahji bahwa Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim adalah seorang greader sempurna ;

- Kemudian Pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Juli 2001 saksi korban Kudhori bin Bari dengan perantara dr.Aisyah Lahji dikenalkan pada Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim, dan kemudian Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim mengajak saksi Kudhori bin Bari untuk bekerja sama jual beli keranjang tembakau, kemudian Juli 2001, saksi korban Kudhori bin Bari menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim dan kemudian pada hari berikutnya pada bulan Juli 2001 dr.Aisyah Lahji menelpon saksi korban yang katanya disuruh Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim untuk pembelian keranjang tembakau diterima oleh dr.Aisyah Lahji dan pelunasan akan dilakukan pada akhir September awal Oktober 2001 atas rangkaian katakata tersebut korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun setelah akhir September awal Oktober 2001 Terdakwa tidak pernah membayar uang pembelian keuntungannya, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya pada hari yang tidak diingat, pada tanggal 14 September 2001 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim menyuruh Agus Saifudin bin Suparman dan Supariyanto bin Sukindar untuk membeli tembakau kering di Desa Tunggak, Kec.Toroh Kab.Grobagan, dimana sebelumnya saksi dr.Aisyah Lahji telah menyuruh saksi korban Kudhori bin Bari untuk membeli tembakau dari para petani yang nantinya akan dibeli oleh Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim dan pembayarannya akan dilakukan dua hari setelah tembakau dikirim, atas rangkaian kata-kata Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim, saksi korban Kudhori bin Bari bergerak hatinya untuk menyerahkan tembakau seberat 8.438 Kg kepada Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim melalui Agus Saifudin bin Suparman dan Supariyanto bin

Sukindar kemudian Agus Saifudin bin Suparman dan Supariyanto bin Sukindar melakukan penimbangan tembakau kering milik saksi korban Kudhori bin Bari dan saksi milik Guntur serta saksi Joko Susilo, dengan berat keseluruhannya 8.438 Kg dengan harga Rp.88.161.000,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 14 September 2001 tersebut dan pada tanggal 15 September 2001 tembakau kering telah dikirim Terdakwa Sriyatun, namun setelah dua hari sejak pengiriman tembakau tersebut tidak membayar, padahal saksi korban Kudhori bin Bari sudah berkali-kali melakukan penagihan, dimana setiap kali ditagih Terdakwa Sriyatun binti Muh. Dalam mengatakan bahwa Terdakwa Sriyatun binti Muh. Dalam masih memiliki stok barang berupa tembakau yang akan dijual dan uangnya akan dibayarkan atau diangsurkan pada saksi korban, sehingga saksi korban Kudhori menjadi percaya dan terpedaya pada kata-kata Terdakwa Sriyatun binti Muh. Dalam tersebut, hingga saksi korban Kudhori bersedia membuat surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2001, tgl. 14 Januari 2002 dan tgl. 1 maret 2002, akan tetapi setelah adanya surat pernyataan tersebut Terdakwa Sriyatun binti Muh. Dalam tetap tidak melakukan pembayaran pada saksi korban, sehingga saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.88.161.000,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo pasal 65 (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sriyatun binti Muh. Dalam pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan primair diatas, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-

sendiri yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar tahun 2000 saksi korban Kudhori bin Bari kenal dengan saksi dr.Aisyah Lahji yang pada saat itu dr.Aisyah Lahji bekerja di Puskesmas Toroh 2 di Ds. Tunggak, Kec.Toroh Kab.Grobagan, yang selanjutnya dr.Aisyah Lahji akan mengenalkan saksi korban Kudhori bin Bari padaTerdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim yang menurut keterangan dr.Aisyah Lahji bahwa Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim adalah seorang Greader Sampurna ;
- Kemudian Pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Juli 2001 saksi korban Kudhori bin Bari dengan perantaraan dr.Aisyah Lahji dikenalkan pada Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim, kemudian Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim mengajak saksi Kudhori bin Bari untuk bekerja sama jual beli keranjang tembakau, selanjutnya masih dalam bulan Juli 2001, saksi korban Kudhori bin Bari menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim dan diterima oleh Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim kemudian pada hari berikutnya pada bulan Juli 2001 dr.Aisyah Lahji menelpon saksi korban yang katanya disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim untuk pembelian keranjang tembakau, uang tersebut diserahkan korban pada dr.Aisyah Lahji diterima oleh dr.Aisyah Lahji dan pembayarannya akan dilakukan pada akhir September awal Oktober 2001, dimana saksi korban dijanjikan akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah uang tersebut diserahkan oleh korban dan semuanya telah diterima Terdakwa, Terdakwa tidak membeli keranjang tersebut namun

dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada hari yang tidak diingat, pada tanggal 14 September 2001 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim menyuruh Agus Saifudin bin Suparman dan Supariyanto bin Sukindar untuk membeli tembakau kering di Desa Tunggak, Kec.Toroh Kab.Grobagan, dimana sebelumnya saksi dr.Aisyah Lahji telah menyuruh saksi korban Kudhori bin Bari untuk membeli tembakau dari para petani yang nantinya akan dibeli oleh Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim dan pembayarannya akan dilakukan dua hari setelah tembakau dikirim, atas rangkaian kata-kata Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim, kemudian Agus Saifudin bin Suparman dan Supariyanto bin Sukindar melakukan penimbangan tembakau kering milik saksi korban Kudhori bin Bari dan saksi milik Guntur serta saksi Joko Susilo, dengan berat keseluruhannya 8.438 Kg dengan harga Rp.88.161.000,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Selanjutnya pada tanggal 14 September 2001 tersebut dan pada tanggal 15 September 2001 tembakau kering telah dikirim ke Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim, namun setelah dua hari sejak pengiriman tembakau tersebut Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim tidak menyerahkan hasil penjualan tembakau tersebut kepada saksi korban Kudhori bin Bari namun dipergunakan oleh Terdakwa Sriyatun binti Muh.Dalim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar ± Rp.88.161.000,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 jo pasal 65 (1) KUHP ;

4. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sriyatun al. Sri Medok binti Muh.Dalim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 379 a jo 65 (1) KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa Sriyatun al. Sri Medok binti Muh.Dalim dengan pidana selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijaatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang berupa;
 - a) Satu lembar pembelian keranjang tembakau antara Kudhori dengan penerima Sri M (Sriyatun) dan Aisyah (dr.Aisyah lahji) tanggal 5 Juni 2001, nilai uang sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b) Satu bendel surat perjanjian pengakuan hutang dari nilai transaksi tembakau tanggal 14 Januari 2002, bermeterai enam ribu rupiah antara Ny.Sriyatun dari pihak pertama/debitur/yang berhutang dengan tuan Kudhori pihak kedua/kreditur/pihak yang berpiutang, nilai akhir diambil kesimpulan sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang harus dilunasi tanggal 28 Pebruari 2002 oleh pihak pertama/debitur/yang berhutang;

- c) Satu lembar surat tanda terima dibuat diatas kertas segel enam ribu rupiah tanggal 22 Januari 2002 perihal penerimaan uang Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari dr.Aisyah lahji untuk membayar uang keranjang an.Kudhori, SH yang dibuat oleh Suparman suami Sriyatun dengan saksi Supriyanto;
- d) satu lembar nota perincian barang berupa keranjang tembakau dan tembakau kering serta perincian harga, tanpa tanggal atas nama Sri (Sriyatun) dan mas To (Supriyanto) kepada Mas Dhori;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan :
- 1) Tanggal 19 Nopember 2001 antara Sri Medok (Sriyatun bt.Muh Dalim) sebagai pihak I dengan Kudhori sebagai pihak II perihal kesepakatan bahwa pihak I akan memberikan sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sejumlah uang sebanyak Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) yang ada dvi Weleri ;
 - 2) Tanggal 1 Maret 2002 antara Kudhori bin Bari sebagai pihak I dengan Sriyatun binti Muh.Dalim sebagai pihak II perihal bahwa pihak II atas barang berupa tembakau sebanyak 8.438 Kg dengan harga Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dibayar tanggal 5 Agustusv2002 dan setelah perjanjian dalam waktu 10 hari pihakvII sanggup menyerahkan kepada pihak I sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3) Tanggal 7 Januari 2002 antara Sri Medok (Sriyatun bt.Muh Dalim) kepada Supriyanto dan Kudhori, SH perihal bahwa semua perhitungan dan pembayaran tembakau tanggung jawab/pelunasan/penyelesaian oleh Sri Medok (Sriyatun) tidak kepada dr.Aisyah L. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- e) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi

- a. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Sriyatun al. Sri Medok binti Muh.Dalim terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- b. Melepaskan Terdakwa Sriyatun al. Sri Medok binti Muh.Dalim oleh karena itu segala tuntutan ;
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (Rehabilitasi) ;
- d. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) Satu lembar pembelian keranjang antara an.Kudhori dengan atas nama Sri M (Sriyatun) tanggal 5 Juni 2001 ;
 - 2) Satu lembar surat tanda terima tanggal 22 Januari 2002 ;
 - 3) Satu lembar nota perincian barang dan harga keranjang tembakau dan tembakau kering ;
 - 4) Satu bendel Surat Perjanjian pengakuan hutang antara Ny.Sriyatun dengan Tn.Kudhori tanggal 14 Januari 2002 ;
 - 5) Tiga lembar Surat Perjanjian antara Kudhori dengan Sriyatun teranggal 19 Nopember 2001, tanggal 1 Maret 2002 dan tanggal 7 Januari 2002; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- e. Membebaskan Terdakwa dari tahanan Rumah ;
- f. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara ;

5. Putusan Mahkamah Agung

a. Pertimbangan Mahkamah Agung

- 1) Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Undang- Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Purwodadi tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

- 2) Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;
- 3) Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terdapat putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;
- 4) Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 5) Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu berdasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa

pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

- 6) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2003 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2003 akan tetapi risalah kasasinya yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Purwodadi pada tanggal 18 Juli 2003, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 7) Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa tidak dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam tingkat ini dibebankan kepada Negara ;

b. Putusan Mahkamah Agung

MENGADILI :

- 1) Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI PURWODADI tersebut ;
- 2) Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 April 2004** oleh H.German Hoediarto, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.Soedarno, S.H, dan H.M.Imron Anwari, SH.Sp.N.MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

commit to user

pada hari **SELASA, TANGGAL 27 APRIL 2004** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H.Soedarno, S.H, dan H.M.Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Agus.

B. Pembahasan

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menolak Kasasi Penuntut Umum Pada Kasus Nomor : 1472 K/Pid/2003 Terhadap Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas dilakukan dengan cara memberantas tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh ialah hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan hakim tersebut dimaksudkan agar orang yang melakukan tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dalam pengajuan kasasi oleh penuntut umum, sebelum menjatuhkan putusannya Nomor : 1472 K/Pid/2003 Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai beberapa hal terkait dengan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut diantaranya adalah :

1. Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Undang-Undang No.8 tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Undang-Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Purwodadi

tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

2. Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;
3. Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;
4. Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu berdasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;
6. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2003 dan Pemohon Kasasi

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2003 akan tetapi risalah kasasinya yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Purwodadi pada tanggal 18 Juli 2003, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa tidak dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam tingkat ini dibebankan kepada Negara ;

Dalam pertimbangan tersebut diatas dijelaskan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi yang sudah ada mengenai putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa yang bersifat bebas murni seperti dalam yurisprudensi Mahkamah Agung : No. 449 k/Pid/1984, maka permohonan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam perkara tindak pidana perbarengan yang dilakukan oleh terdakwa Sriyatun alias Sri medok binti Muh. Dalim diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Purwodadi dan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Kaidah hukumnya adalah dalam yurisprudensi tersebut Apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah

merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada perkara Nomor : 1472 K/Pid/2003 Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi/penuntut umum/jaksa tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian dan hal-hal yang sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas. Selain itu Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena bebas. Selain itu Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi pemohon kasasi / penuntut umum/jaksa berdasarkan Pasal 244 UU No. 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Pertimbangan Mahkamah Agung selanjutnya adalah mempertimbangkan mengenai Pasal 248 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan mengenai apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. Pengajuan memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut

Umum dalam perkara tersebut adalah telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), berdasar penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri yang telah dijatuhkan pada tanggal 16 juni 2003 dengan mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 juni 2003, akan tetapi risalah kasasinya yang memuat alasan-alasan permohonan baru diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 18 juli 2003, jadi ada keterlambatan 14 hari sejak diajukannya permohonan kasasi, dan keadaan tersebut tidak bersesuaian dengan dengan Pasal 248 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor tgl. 12-9-1974 No. K/Kr/1974 menjelaskan bahwa permohonan kasasi yang diajukan dengan melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 122 U.U M.A.I harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini serupa dengan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan tersebut sehingga hak untuk mengajukan permohona kasasi gugur. Berdasar pertimbangan hakim yang didasarkan pada pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hokum. Mencermati Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sriyatun alias Sri medok binti Muh. Dalim bukan merupakan suatu tindak pidana atau perkara pidana karena dalam perbuatan tersebut unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak ada atau tidak terbukti dan tidak menjelaskan bahwa terdakwa benar

telah melakukan perbuatan pidana. Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa berupa melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri menjadikan Sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, pada dakwaan penuntut umum perbuatan tersebut jelas bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata karena dalam perbuatan tersebut unsur perdatanya lebih terbukti, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ialah perbuatan yang berupa jual beli tembakau dan utang piutang, perbuatan jual beli tembakau dan utang piutang yang dilakukan oleh terdakwa yang dijadikannya sebagai mata pencaharian dengan maksud mendapat barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang dilakukan dengan cara tidak membayar atau tidak melunasi atau tidak membayar lunas perbuatan tersebut menurut Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Sriyatun alias Sri medok binti Muh. Dalim terbukti tetapi tidak merupakan perkara pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasar uraian pertimbangan Mahkamah Agung diatas maka dapat dijelaskan mengenai tidak diterimanya permohonan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang disebabkan karena tidak memenuhi unsur Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasar Pasal 191(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terbukti karena perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi telah benar dan sesuai dengan pasal perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan dalam pembahasan bab-bab tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, bahwa hakim Mahkamah Agung tidak menerima kasasi Penuntut Umum karena Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi telah benar dan tepat dalam menerapkan pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menerapkan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam putusannya tersebut, dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah : A) Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. B) Pasal 248 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan mengenai apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. C) Selain dari kedua pasal peraturan perundang-undangan tersebut Mahkamah Agung juga menggunakan yurisprudensi untuk menguatkan peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Saran

1. Penuntut umum harus memperhatikan waktu-waktu pengajuan upaya Hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), melalui sistem kontrol bertingkat.
2. Perlu diberikan sanksi administratif kepada Penuntut Umum yang lalai tidak memperhatikan tenggang-tenggang waktu pengajuan kasasi sehingga berakibat permohonan kasasinya tidak diterima oleh Mahkamah Agung.

